

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN DAERAH TERTINGGAL, TRANSMIGRASI,
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN PERTOLONGAN/BASARNAS)**

Tahun Sidang	: 2025 – 2026
Masa Sidang	: II
Rapat	: Ke – 7
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Rabu, 26 November 2025
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.24 WIB s.d 13.35 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI.
Acara	: 1. Membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2024 2. Lain-lain
Ketua Rapat	: Lasarus, S.Sos.,M.Si
Sekretaris	: Nina Herlina, S.H
Hadir Anggota	: 31 dari 48 orang Anggota Komisi V DPR RI.
Hadir Mitra	: Menteri Pekerjaan Umum beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.24.WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum pada hari ini adalah Membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2024 dan lain-lain.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Dalam rangka tindak lanjut penyelesaian rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) II Tahun 2024 BPK RI, Komisi V DPR RI mewajibkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar:
 - 1) Memperkuat peran pengendalian internal oleh Inspektorat Jenderal dan memperbaiki tata kelola pengawasan pembangunan sektor PU;
 - 2) Menerapkan Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) pada setiap infrastruktur yang dibangun dengan skema dan mekanisme pengawasan yang ketat;
 - 3) Menerapkan monitoring dan evaluasi berbasis *outcome* (*outcome based money*) agar setiap kegiatan benar-benar menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat;
 - 4) Menyusun panduan rencana rinci yang komprehensif (*blueprint*) dan melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur termasuk bendungan;
 - 5) Melakukan antisipasi terhadap permasalahan sosial dari pembangunan infrastruktur.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PU untuk :
 - 1) Memperbanyak Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat dan kegiatan Instruksi Presiden (Inpres) di sektor PU yang bermanfaat langsung bagi masyarakat;
 - 2) Melakukan upaya preventif dan penanganan terhadap infrastruktur yang terdampak bencana alam seperti banjir dan tanah longsor;
 - 3) Memprioritaskan penyedia jasa konstruksi lokal dalam keikutsertaan pada proyek-proyek infrastruktur.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.35.WIB.

Jakarta, 26 November 2025

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DODY HANGGODO

KETUA RAPAT,

ttd

L A S A R U S